

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dinamika bisnis pada masa sekarang dapat dikatakan dalam fase yang cukup matang. Dimana banyak sektor yang mulai berkembang secara pesat bahkan mulai muncul sebagai mobilisasi ekonomi pada suatu negara. Baik dengan dalih persaingan global yang semakin kompetitif atau tuntutan manusia akan suatu kebutuhan yang semakin meningkat. Namun semuanya tidak akan pernah berjalan dengan baik jika dalam sebuah negara dimana industri tersebut berkembang tidak difasilitasi dengan regulasi-regulasi yang memadai. Lebih spesifik lagi yaitu seperangkat peraturan yang memihak pada pengusaha-pengusaha local dan tidak mematikan alur dari semua *stakeholders*, dalam hal ini masyarakat yang dilibatkan. Disamping regulasi yang seringkali diserukan oleh para kalangan, kemampuan individu dari perusahaan untuk menjalankan roda usahanya juga menjadi suatu hal yang sakral untuk diabaikan. Pada negara maju seperti Amerika, banyak para pakar ekonomi dan bisnis yang dengan totalitas mencurahkan waktu dan tenaga guna memperhatikan kalangsungan dinamika usaha. Masukan bahkan kritikan diakomodasi dalam suatu forum yang terbentuk untuk menciptakan formula-formula yang nantinya akan dapat digunakan oleh sebagian besar pelaku usaha. Banyak praktek kecurangan yang terjadi yang menyebabkan persaingan dalam suatu industri menjadi tidak stabil. Seperti manipulasi aktiva

perusahaan untuk menghindari pajak dan bahkan tidak membayarkan pajak untuk beberapa periode, pembohongan publik atas kondisi *financial* (keuangan) perusahaan yang sebenarnya dan penyalahan prosedur-prosedur yang lainnya.

Tak lepas dari wacana yang ada, kenyataan dalam dunia usaha sekarang ini sangat sulit untuk ditebak dan diprediksi. Ambigu dari arah sistim pemerintahan dan ekonomi yang kerap membuat kebingungan para pelaku usaha dan investor. Mekanisme pasar yang cepat berubah juga merupakan kendala dan tantangan untuk dapat memodifikasi kebijakan yang ada. Hal ini kerap menjadikan perusahaan kehilangan jati diri dan praktek-praktek kurang sehat menjadi kebiasaan untuk dapat tetap eksis.

Menanggapi hal demikian, maka dalam perkembangannya konsep-konsep akan kebutuhan dunia usahapun terbentuk dan tersaji dalam suatu mekanisme prosedural. Para praktisi, pelaku usaha dan pemerintah bekerja sama untuk menciptakan ketentuan-ketentuan yang mengarah pada tata kelola perusahaan yang sehat. Dimana hal tersebut akan berimbas pada mobilisasi perekonomian secara menyeluruh. Berkaitan dengan pasar bebas, penanaman modal saham merupakan hal yang cukup menentukan dalam keberhasilan suatu industri. Perusahaan –perusahaan besar yang menggunakan modal saham kerap mendapati permasalahan-permasalahan kompleks. Dimana manajemen dalam sebuah perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Disisi lain, perusahaan tidak dapat mengandalkan modal sendiri (saham) namun pemakaian modal asing

(hutang) juga hal pokok yang ikut dipertimbangkan. Dengan permasalahan yang demikian, kiranya suatu mobilitas usaha sangat memerlukan sebuah prosedur guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Good Corporate Governance (GCG), atau tata kalola perusahaan yang baik merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan dalam dinamika ekonomi dan bisnis. Karena banyaknya para ahli yang berkecimpung pada permasalahan ini, sehingga terjadilah keragaman konsep dan definisi mengenai *corporate governance*. Menurut *Indonesian Institute for Corporate Governance (IIGC, 2001)*, *GCG* didefinisikan sebagai suatu proses dan terstruktur yang digunakan guna melindungi dan mengatur bisnis dari praktik kecurangan perusahaan sehingga menciptakan kemakmuran dan akukntabilitas perusahaan yang akhirnya akan merealisasikan kemakmuran pemegang saham dalam waktu yang panjang dan stakeholders secara keseluruhan.

Sesuai dengan definisi yang dirumuskan *IICG* maka isu pokok yang dibahas dalam *GCG* adalah tentang struktur dan proses pengelolaan perusahaan. Struktur *governance* adalah struktur hubungan pertanggung jawaban dan pembagian peran diantara berbagai organ utama perusahaan, yakni pemegang saham (pemilik), pengawas (komisaris), dan pengelola (direksi/manajemen). Sedangkan proses *governance* merupakan mekanisme kerja dan interaksi aktual diantara organ-organ utama perusahaan tersebut. Meskipun pada dasarnya proses *governance* dipengaruhi oleh struktur *governance* akan tetapi pada realitanya dapat terjadi bahwa interaksi antar

organ perusahaan berjalan menyimpang dari struktur yang ada (Antonius dan Subarto 2004).

Penelitian tentang *GCG* di Bursa Efek Jakarta (BEJ) memfokuskan pada masalah struktur *governance*. Pada umumnya struktur *governance* yang diteliti adalah komisaris independen, komite audit, komisaris, direksi, kepemilikan saham manajemen, dan kepemilikan saham institusional.

Banyak langkah yang dapat digunakan guna mengaplikasikan mekanisme tersebut. Transparansi dan kepercayaan menjadi patokan atas suksesnya sebuah perusahaan dalam mengoprasikan roda bisnis. Pada kebanyakan akademisi cenderung mengulas *corporate governance* dari sudut pandang struktur pendanaan yang melibatkan beberapa pihak *share holders* atau lebih tepatnya pada segi keagenan.

Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme dalam mengurangi konflik antara manajer dan pemegang saham (keagenan). Menurut Jansen and Meckling (1976) dalam Faisal (2005), kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* yang utama dalam mengurangi masalah keagenan. Fama (1980) dalam Faisal (2005) menyatakan bahwa dewan direksi merupakan mekanisme pengendalian internal utama yang memonitor manajer. Dimana tiga karakteristik yang digunakan adalah ukuran dewan direksi, komposisi dewan direksi dan struktur kepemimpinan direksi (Jensen 1993).

Hasil penelitian Rozeff (1982) dalam Faisal menyatakan bahwa *dividen*, *leverage* dan kepemilikan manajerial mempengaruhi masalah

keagenan. Demsetz dan Lehn (1985) dalam Faisal (2005), menyimpulkan bahwa konsentrasi kepemilikan digunakan perusahaan untuk menghilangkan masalah keagenan. Hal tersebut diturunkan dari logika bahwa peningkatan proporsi kepemilikan saham pada manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan *perquisites* (penahanan laba usaha) yang berlebihan atau kebijakan laba ditahan.

Dengan terjadinya permasalahan keagenan pada suatu perusahaan, maka dapat mengakibatkan biaya-biaya yang mau-tidak mau harus ditanggung oleh pihak yang terlibat. Dengan terciptanya suatu mekanisme yang mengarah pada penataan perusahaan yang baik, maka kiranya hal tersebut mampu mengatasi permasalahan yang ada.

Penelitian Ang et al. (1999) dalam Faisal (2005) memberikan bukti terhadap hubungan antara struktur kepemilikan dengan biaya keagenan yang diukur dari pemanfaatan aktiva dan beban operasi. Dan penelitian Sing et al (2003) dalam Faisal (2005) menganalisis hubungan antara struktur kepemilikan dengan dengan biaya keagenan pada perusahaan – perusahaan yang *go public*. Dan hasil penelitian Singh et al mendukung penelitian Ang et al.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sudah ada tanpa pengembangan konsep dan variabel, yaitu Faisal (Universitas Diponegoro, 2005) dengan judul:

“Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Direksi Terhadap Agency Cost, sebagai Mekanisme *Corporate Governance* Pada Perusahaan *Go Public* yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta“.

B. BATASAN MASALAH

Untuk menjaga supaya permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka dalam penelitian ini dibatasi meliputi:

1. Periode yang pengamatan yang digunakan dalam penelitian adalah tahun 2003, 2004 dan 2005.
2. Penelitian ini menganalisis laporan keuangan dengan variabel independen struktur kepemilikan saham (yang terdiri dari kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham institusional) dan dewan direksi, variabel dependen biaya keagenan dan variabel kontrol ukuran perusahaan, *leverage*, deviden dan risiko.
3. Penelitian ini menggunakan variabel dependen biaya keagenan yang diukur dengan menggunakan rasio perputaran asset dan *Selling and General Administrative (SGA)*.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan

1. Apakah kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap biaya keagenan pada perusahaan *go public* yang terdaftar di BEJ ?
2. Di antara ketiga variabel independen, manakah yang paling signifikan berpengaruh terhadap biaya keagenan pada perusahaan *go public* yang terdaftar di BEJ ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional dan ukuran dewan direksi terhadap biaya keagenan dengan ukuran perusahaan, *lverage*, deviden dan risiko sebagai variabel kontrol pada perusahaan *go public* yang terdaftar di BEJ.
2. Menganalisis variabel (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran direksi) yang paling signifikan berpengaruh terhadap biaya keagenan pada perusahaan *go public* yang terdaftar di BEJ.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi praktisi

Penelitian ini akan menambah kejelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu dimana dengan berkembangnya dinamika ekonomi dan bisnis menyebabkan keberagaman konsep mengenai *corporate governance*

Sehingga apa yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat ditarik relevansinya dengan penelitian – penelitian yang lain.

2. Bagi akademisi

Pada tataran akademisi, penelitian ini mengantarkan dan menambahkan wawasan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang dilihat dari sudut pengaturan kepentingan pemegang saham dengan perusahaan. Dimana jika dilihat secara umum, *corporate governance* dapat diterapkan pada semua bentuk usaha. Baik usaha *financial* maupun *non – financial*.

3. Bagi pelaku usaha

Konsep yang dijelaskan dalam penelitian ini diharapkan dapat diterapkan oleh para pelaku usaha mengenai pengaturan proporsi kepemilikan saham.

4. Bagi investor

Diharapkan dengan memahami mekanisme *corporate governance*, para investor akan semakin mengenal karakteristik perusahaan berdasarkan struktur kepemilikan dan kebijakan – kebijakan yang diterapkan. Sehingga dalam usia investasi yang dilakukan akan mendatangkan keuntungan yang